

**ANALISIS KEGAGALAN PERAN KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU)
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI KELOMPOK PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA
(PERTUNI) PADA PEMILU TAHUN 2024 DI JAKARTA**

KANIA AURA ANTARTIKA

ABSTRAK

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan momentum penting bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Namun, tingkat partisipasi disabilitas kerap kali mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya kegagalan dari pihak penyelenggara dalam menjalankan perannya. Hal serupa dialami oleh Pertuni selaku kelompok yang mewadahi penyandang disabilitas tunanetra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam meningkatkan partisipasi kelompok Pertuni dan faktor apa saja yang menyebabkan turunnya partisipasi Pertuni pada Pemilu tahun 2024 di DKI Jakarta yang dianalisis melalui teori peran menurut Soerjono Soekanto dan teori inklusivitas politik menurut Arend Lijphart. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, jurnal, dan buku terkait. Data yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan teknik reduksi data yang dilanjutkan dengan data display dan diakhiri dengan verifikasi. Melalui tahapan tersebut hasil yang ditemukan penulis ialah adanya kegagalan peran aktif yang dijalankan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan peran partisipatif yang dilakukan oleh anggota pendukung yaitu badan ad hoc selaku turunan langsung dari KPU Provinsi DKI Jakarta, selain itu penurunan disebabkan oleh beberapa hal seperti: (1) tidak dilibatkannya Pertuni dalam perencanaan Alat Bantu Tuna Netra (ABTN); (2) sosialisasi yang tidak merata dan tidak terstruktur; (3) sentralisasi kebijakan oleh KPU RI; (4) tidak Adanya Representasi tunanetra dalam KPU; (5) ketergantungan terhadap organisasi, bukan pendekatan personal; (6) absennya evaluasi partisipatif terhadap program inklusi; (7) ketiadaan data yang akurat dan tervalidasi; dan (8) rasa kecewa dan keengganan memilih di kalangan Pertuni. Dapat disimpulkan bahwa menurunnya partisipasi politik Pertuni disebabkan oleh kegagalan peran KPU Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan partisipasi Pertuni sebagai kelompok pemilih disabilitas.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Kelompok Disabilitas, Peran Penyelenggara Pemilu, Penurunan Partisipasi.

***ANALYSIS OF THE FAILURE OF THE ROLE OF KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) OF DAERAH KHUSUS JAKARTA PROVINCE IN
INCREASING THE PARTICIPATION OF PERSATUAN TUNANETRA
INDONESIA (PERTUNI) IN THE 2024 ELECTION IN JAKARTA***

KANIA AURA ANTARTIKA

ABSTRACT

General elections (Pemilu) serve as a crucial foundation for democratic governance, ensuring the equal participation of all citizens, including persons with disabilities. Despite legal guarantees, individuals with disabilities, particularly those with visual impairments, often face barriers to meaningful participation. This study examines the failure of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) of the Special Capital Region of Jakarta in increasing the electoral participation of the Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) during the 2024 General Election. Utilizing Soerjono Soekanto's role theory and Arend Lijphart's theory of political inclusiveness, this research adopts a qualitative descriptive method, collecting data through semi-structured interviews, journals, and relevant literature. The analysis is conducted through data reduction, data display, and verification. The findings reveal a failure of the KPU to carry out its active role, alongside insufficient participatory roles from its supporting ad hoc bodies. The decline in participation is attributed to several factors: (1) exclusion of Pertuni from the planning of Braille Ballot Templates (ABTN); (2) uneven and unstructured voter education; (3) centralization of decision-making by the national KPU (KPU RI); (4) lack of representation of visually impaired individuals within the electoral commission; (5) dependency on formal organizations rather than personal outreach; (6) absence of participatory evaluation of inclusive programs; (7) lack of accurate and validated data; and (8) feelings of disappointment and disengagement within the Pertuni community. This study concludes that the KPU's failure to engage inclusively and meaningfully has led to declining political participation and growing distrust among blind voters in Jakarta.

Keywords: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Disability Groups, Role of Election Organizers, Decrease in Participation.